



Pengaruh Anggaran Bantuan dan Pernikahan terhadap Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Utara 2010-2024

Bunga Madu Simanungkalit¹, Joko Suharianto²

^{1,2}Universitas Negeri Medan

Email : bunga.7243540009@mhs.unimed.ac.id¹, djoko@unimed.ac.id²

Article Info

Article history:

Received April 13, 2025

Revised April 28, 2025

Accepted Juni 02, 2025

Keywords:

Aid and Marriage Budget,
Population, North Sumatra

ABSTRACT

This study analyzes the influence of government aid budgets and marriage rates on population growth in North Sumatra Province between 2010 and 2024. North Sumatra has experienced significant demographic changes, prompting concerns about whether population growth is accompanied by improvements in public welfare. The research finds a positive correlation between government aid and population growth, while marriage rates show fluctuating patterns influenced by economic conditions and policy shifts. The study concludes that both variables significantly impact population trends, although not in a strictly linear way. These insights are important for developing effective policies in welfare distribution and population control.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 13, 2025

Revised April 28, 2025

Accepted Juni 02, 2025

Kata Kunci:

Anggaran Bantuan dan
Pernikahan, Jumlah Penduduk,
Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh anggaran bantuan pemerintah dan tingkat pernikahan terhadap pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2010–2024. Sumatera Utara mengalami perubahan demografis yang cukup signifikan, sehingga muncul kekhawatiran apakah pertumbuhan penduduk diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara bantuan pemerintah dan pertumbuhan penduduk, sementara tingkat pernikahan menunjukkan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kebijakan. Penelitian menyimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tren kependudukan, meskipun tidak secara linear. Temuan ini penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengendalian penduduk dan distribusi kesejahteraan yang lebih efektif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Bunga Madu Simanungkalit

Universitas Negeri Medan

E-mail: bunga.7243540009@mhs.unimed.ac.id

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan mampu menunjang keberhasilan dalam pembangunan (M. Umer, 2013). Namun, jika jumlah penduduknya melonjak cepat justru akan menghambat pembangunan ekonomi (Iskandar, 2013). Begitu juga pengeluaran pemerintah atau anggaran belanja Negara yang terus naik untuk manajemen pemenuhan kebutuhan publik juga menghambat pertumbuhan ekonomi (M. Umer Chapra, 2000). Misalkan, meningkatnya anggaran biaya langsung dan anggaran biaya tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bantuan sosial, belanja hibah dan lain sebagainya. Sumatera utara merupakan salah satu wilayah dengan



populasi yang relatif tinggi setelah pulau Jawa. Data Statistik menunjukkan perkembangan jumlah penduduk dari tahun 1987 sampai 2016 mengalami kenaikan di tiap tahunnya (BPS Sumut, 2016). Pada tahun 1987 perkembangan jumlah penduduk di Sumatera Utara sebesar 9.901.862 juta jiwa, dan mengalami peningkatan di tahun 1988 sampai 1989 sebesar 10.330.091 juta jiwa. Kemudian mengalami penurunan di tahun 1990 sebesar 10.256.027 juta jiwa. Pada tahun 1991 perkembangan jumlah penduduk di Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 10.572.769 juta jiwa sampai tahun 1999 sebesar 11.955.400 juta jiwa. Tahun 2000 kembali mengalami penurunan sebesar 11.513.973 juta jiwa, dan meningkat kembali pada tahun 2001 sebesar 11.722.397 juta jiwa sampai tahun 2009 sebesar 13.248.386 juta jiwa. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara menurun sebesar 12.982.204 juta jiwa. Hal ini disebabkan karena pemerintahan orde baru menetapkan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan melaksanakan program keluarga berencana. Dengan diterapkannya hal tersebut laju pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk Sumatera Utara dan wilayah lainnya berhasil diatasi, namun di tahun 2011 kembali mengalami peningkatan sampai 2016 sebesar 14.102.911 juta jiwa. Naiknya laju pertumbuhan penduduk ini diakibatkan karena adanya hambatan dalam nilai sosial budaya masyarakat yang masih tradisional. Kenaikan di tahun ini dapat memicu timbulnya kemiskinan, pengangguran, putus sekolah serta permasalahan terkait ketahanan dan kesejahteraan (Sumut, 2017). Seperti halnya yang terjadi di Sumatera Utara, belanja Negaranya juga fluktuasi di tiap tahunnya. Pada tahun 1987, laju perkembangan pengeluaran pemerintah Sumatera Utara sebesar 205.200 juta, dan mengalami peningkatan pada tahun 1988 sebesar 290.355 juta sampai tahun 1997 sebesar 771.000 juta. Di tahun 1998 pengeluaran pemerintah cenderung mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 342.600 juta sampai tahun 2000 sebesar 416.800 juta. Keadaan ini disebabkan karena krisis ekonomi global yang dimulai dari krisis finansial yang mempengaruhi perekonomian dunia. Pada keadaan ini pemerintah diharuskan merumuskan instrument dalam kajian fisik terutama dalam penerimaan pengeluaran dan dampaknya terhadap perekonomian untuk mengurangi tingkat pengangguran dan inflasi serta nilai tukar yang lemah (Sumut, 2017). Pada tahun 2001, pengeluaran pemerintah setelah krisis cenderung mulai membaik sebesar 916.200 juta sampai tahun 2013 sebesar 8.866.900 juta. Peningkatan ini didukung oleh peran pemerintah dalam mengarahkan perekonomian yang positif dengan berbagai cara dan kebijakan-kebijakan dengan menjaga daya tahan perusahaan atau sektor usaha serta menciptakan kesempatan kerja untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun pada tahun 2014 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan sebesar 8.525.300 juta sampai 2015 sebesar 8.679.300 juta. Dan di tahun 2016 pengeluaran pemerintah kembali meningkat sebesar 9.476.420 juta, ini disebabkan karena meningkatnya anggaran biaya langsung dan anggaran biaya tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bantuan sosial, belanja hibah dan lainnya. Dari data yang ada di atas, penting untuk diketahui apakah meningkatnya jumlah penduduk dan naiknya anggaran belanja Negara yang terus fluktuasi setiap tahunnya mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Kemenerikan Penelitian

Penelitian ini menarik karena membahas dinamika kependudukan dan kaitannya dengan fenomena sosial-ekonomi seperti pernikahan dan anggaran bantuan di Sumatera Utara. Di tengah pertumbuhan penduduk yang signifikan dan fluktuasi belanja pemerintah, penting untuk memahami hubungan antara faktor-faktor ini agar dapat merumuskan kebijakan pembangunan



yang efektif dan berkelanjutan. Apalagi, adanya penurunan jumlah pernikahan secara drastis di tahun 2023 menjadi anomali yang patut diselidiki lebih dalam

Identitas Masalah

Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan atau jumlah pernikahan yang stabil. Bahkan, terdapat ketimpangan dalam pembangunan antarwilayah, tekanan terhadap infrastruktur dan layanan publik, serta fluktuasi dalam anggaran belanja pemerintah. Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana hubungan antara jumlah penduduk, jumlah pernikahan, dan anggaran bantuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan Masalah

- Apakah terdapat hubungan signifikan antara jumlah penduduk dan jumlah pernikahan di Sumatera Utara?
- Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap besaran anggaran bantuan sosial?
- Apakah jumlah pernikahan turut memengaruhi peningkatan anggaran bantuan dan sebaliknya?
- Bagaimana hubungan ketiga variabel tersebut memengaruhi pembangunan wilayah secara umum.

Tujuan Penelitian

- Menganalisis hubungan antara jumlah penduduk dan jumlah pernikahan di Sumatera Utara.
- Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap besaran anggaran bantuan.
- Mengkaji keterkaitan antara jumlah pernikahan dan anggaran bantuan.
- Memberikan gambaran empirik terhadap hubungan antara ketiga variabel dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Manfaat Penelitian

- a. Teoritis:** Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial dan kependudukan, khususnya dalam memahami hubungan antarvariabel demografi dan ekonomi.
- b. Praktis:** Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan, pengendalian pernikahan dini, dan distribusi anggaran bantuan yang tepat sasaran.
- c. Kebijakan Publik:** Memberikan rekomendasi berbasis data untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen resmi pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah penduduk, jumlah pernikahan, dan anggaran bantuan sosial dari tahun ke tahun. Teknik analisis yang digunakan mencakup korelasi dan regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh antara variabel independen (jumlah pernikahan dan anggaran bantuan) terhadap variabel dependen (jumlah



penduduk). Pemilihan metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan statistik yang signifikan dan pola tren yang muncul dari ketiga variabel tersebut dalam konteks pembangunan daerah.

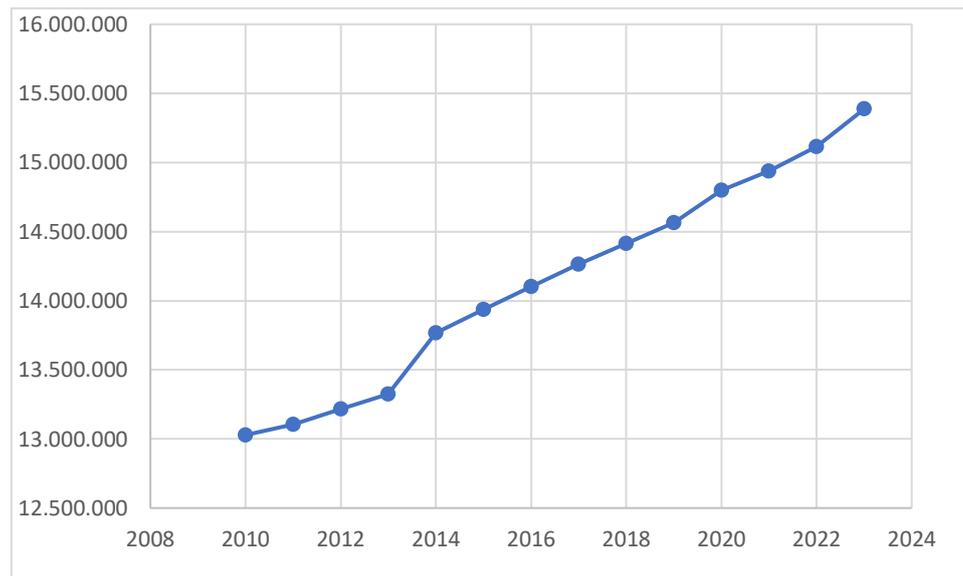
HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Y

Jumlah penduduk di Sumatera Utara merujuk pada total individu yang tinggal di wilayah provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagaimana dikemukakan oleh Todaro (2006), pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dapat menjadi tantangan besar bagi pembangunan ekonomi suatu daerah.

Fenomena Masalah

di Sumatera Utara menunjukkan dinamika yang kompleks. Provinsi ini merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni lebih dari 15 juta jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tidak hanya menjadi indikator pertambahan jumlah manusia, tetapi juga mencerminkan tekanan terhadap infrastruktur, lapangan kerja, dan layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Kawasan metropolitan Medan yang mencakup Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, dan sebagian Kabupaten Karo mengalami lonjakan urbanisasi yang pesat. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi aktivitas ekonomi dan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan wilayah pedalaman. Akibatnya, terjadi ketimpangan antarwilayah dalam hal pembangunan dan kesejahteraan. Masalah sosial pun muncul seiring dengan pertumbuhan penduduk. Meski angka kemiskinan menurun, jumlah penduduk miskin secara absolut tetap tinggi, yakni lebih dari satu juta jiwa. Selain itu, pengangguran masih menjadi persoalan serius, dengan ratusan ribu orang tidak memiliki pekerjaan tetap. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru. Secara keseluruhan, pertumbuhan jumlah penduduk di Sumatera Utara membawa dampak besar terhadap perencanaan wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dituntut untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi ketimpangan pembangunan, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan penduduk dapat menjadi kekuatan, bukan beban. Secara keseluruhan, pertumbuhan jumlah penduduk di Sumatera Utara membawa dampak besar terhadap perencanaan wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dituntut untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi ketimpangan pembangunan, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan penduduk dapat menjadi kekuatan, bukan beban. Hal ini bias dilihat dari gambar 1.1. Berikut



Gambar 1.1.Jumlah Penduduk Sumatera Utara Tahun 2010 Sampai 2024

Berdasarkan Gambar 1.1. Di Atas Diketahui Banyaknya Jumlah Penduduk. Gambar tersebut menunjukkan tren jumlah penduduk dari tahun 2010 hingga 2024. Terlihat bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah penduduk berada di kisaran 13 juta dan terus meningkat hingga mencapai sekitar 15,4 juta pada tahun 2023. Kenaikan jumlah penduduk ini menunjukkan pertumbuhan yang relatif konsisten dari tahun ke tahun, dengan lonjakan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014. Grafik ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang stabil selama periode tersebut.

Faktor Yang Mempengaruhi Y

Hal ini diperkuat dari beberapa pendukung pendapat ahli diantaranya . Menurut Soekanto (2002), faktor sosial budaya seperti adat istiadat dan norma agama memainkan peranan penting, terutama dalam masyarakat adat seperti Batak yang memiliki pandangan bahwa banyak anak adalah simbol kekuatan dan keberkahan. Todaro (2003) menambahkan bahwa kondisi ekonomi juga menjadi faktor penentu; keluarga dengan pendapatan rendah cenderung memiliki anak lebih banyak karena anak dianggap dapat membantu ekonomi keluarga. Selanjutnya, Bongaarts (1982) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan langsung dengan jumlah anak yang diinginkan; semakin tinggi pendidikan seseorang, umumnya semakin rendah keinginan untuk memiliki banyak anak. Notoadmodjo (2003) menyebutkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, khususnya program Keluarga Berencana, sangat memengaruhi angka kelahiran dalam pernikahan. Sementara itu, McDonald (2000) menekankan bahwa usia saat menikah juga menjadi faktor penting; pernikahan dini memberikan peluang reproduksi yang lebih panjang, yang dapat berdampak pada jumlah anak yang dimiliki pasangan.

Definisi X1

Salah satu factor yang mempengaruhi penyerapan jumlah penduduk adalah pernikahan menurut SOEKANTO (1982), pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh norma hukum, agama, dan adat, serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang sah dan menetap. Ia menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk lembaga sosial yang memiliki peranan dalam menjaga ketertiban dan



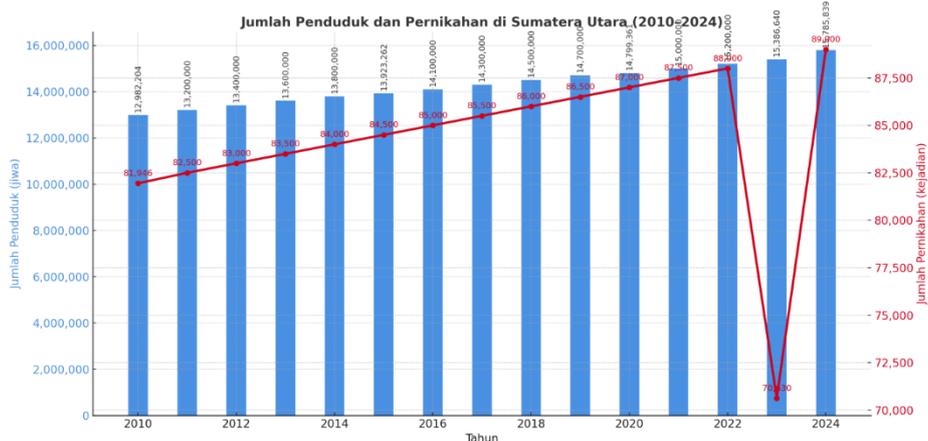
kelangsungan masyarakat. Fungsi pernikahan yang utama, salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Dengan demikian, pernikahan memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan jumlah penduduk. Dalam masyarakat yang memiliki angka pernikahan tinggi dan usia menikah yang relatif muda, angka kelahiran cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan sarana utama dalam proses reproduksi yang diakui secara sosial dan hukum. Sebaliknya, dalam masyarakat modern, tren penundaan pernikahan dan perubahan pandangan terhadap jumlah anak dalam keluarga telah menyebabkan penurunan angka kelahiran. Perubahan ini berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan penduduk. Negara-negara seperti Indonesia pun merespons hal ini dengan mengembangkan program pengendalian penduduk, salah satunya melalui Program Keluarga Berencana (KB) yang mulai dijalankan pada awal 1970-an. Program ini bertujuan untuk mengatur jumlah kelahiran dalam keluarga dan menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi.

Hal Logis X1-Y

Menurut Santrock (2006), usia dewasa awal—yakni usia 20 hingga 35 tahun—merupakan fase di mana individu umumnya memasuki jenjang pernikahan dan menghadapi tuntutan penyesuaian emosional serta sosial yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, kelompok usia ini mencakup lebih dari 50 juta penduduk (BPS, 2023), yang berarti kebutuhan akan kesiapan pernikahan semakin mendesak. Menurut Olson dan DeFrain (2006), kesiapan logis dalam pernikahan—seperti kematangan emosional, kemampuan komunikasi, dan kestabilan ekonomi—sangat memengaruhi penyesuaian pasangan dalam menghadapi konflik dan tekanan rumah tangga. Sementara itu, menurut Nock (1995), ketidaksiapan dalam aspek-aspek tersebut menjadi salah satu penyebab utama tingginya tingkat perceraian, yang mencerminkan kegagalan dalam “penyerapan pernikahan” atau adaptasi terhadap kehidupan pernikahan. Dengan demikian, meskipun jumlah penduduk usia menikah terus meningkat, keberhasilan pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan logis yang dimiliki oleh pasangan, bukan hanya oleh tren demografis.

Gap Data[X1-Y]

Berdasarkan nerasi diatas mengidentifikasi banyaknya jumlah penduduk disumatra utara cenderung akan diikuti oleh banyak ya pernikahan disumatra utara hingga semakin banyak pernikahan maka jumlah penduduk akan semakin bertambah dalam penelitian ini kita dapat melihat gambar grafik jumlah penduduk dan pernikahan pada gamabr 1.2. berikut





Grafik "Jumlah Penduduk dan Pernikahan di Sumatera Utara (2010–2024)" menunjukkan perkembangan dua indikator demografis penting: jumlah penduduk dan jumlah pernikahan. Jumlah penduduk yang digambarkan dengan batang biru mengalami peningkatan stabil setiap tahunnya, dari sekitar 12,98 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 15,78 juta jiwa pada tahun 2024. Ini mencerminkan pertumbuhan yang konsisten, kemungkinan didorong oleh angka kelahiran yang tinggi dan pertumbuhan migrasi. Di sisi lain, jumlah pernikahan yang digambarkan dengan garis merah juga menunjukkan tren naik secara umum, dari 81.946 pernikahan pada 2010 menjadi 89.400 pada 2024. Namun, grafik ini juga menunjukkan anomali mencolok pada tahun 2023, di mana jumlah pernikahan turun drastis menjadi hanya 70.130 kejadian, jauh di bawah tren sebelumnya. Penurunan tajam ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, atau dampak sosial lainnya. Menariknya, pada tahun 2024 jumlah pernikahan kembali melonjak tajam dan bahkan mencapai angka tertinggi selama periode pengamatan. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan signifikan pasca penurunan, yang mungkin dipicu oleh perbaikan kondisi sosial dan ekonomi atau penyesuaian administratif. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pernikahan, dengan pola yang umumnya seiring, meskipun sempat terganggu oleh kejadian luar biasa pada tahun 2023.

Gap Riset[X1-Y]

Hubungan antara jumlah penduduk dan jumlah pernikahan merupakan topik yang menarik dan kompleks untuk diteliti. Secara logika, semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah, maka potensi terjadinya pernikahan juga meningkat karena terdapat lebih banyak individu yang berada dalam usia produktif dan siap menikah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pernikahan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi keputusan individu untuk menikah, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, kesiapan emosional, perubahan gaya hidup, serta norma dan budaya masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, fenomena seperti meningkatnya usia menikah, meningkatnya jumlah individu yang memilih untuk tidak menikah, serta perubahan persepsi terhadap institusi pernikahan turut menjadi faktor penting dalam memengaruhi jumlah pernikahan di tengah pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini, para ahli memberikan pandangan yang memperkuat pentingnya kajian lebih lanjut. Bongaarts (2007) menyatakan bahwa pola pernikahan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis seperti usia kawin pertama, urbanisasi, dan transisi sosial yang terjadi di masyarakat. Ia menekankan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk bukan satu-satunya faktor yang menentukan angka pernikahan, karena keputusan untuk menikah merupakan hasil interaksi dari berbagai dimensi kehidupan individu dan masyarakat. Dengan demikian, riset yang mendalam dan kontekstual sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan (gap) dalam penelitian terdahulu, khususnya yang menyederhanakan hubungan antara jumlah penduduk dan pernikahan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan. Penelitian semacam ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami dinamika sosial yang terjadi, tetapi juga penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Definisi X2

Menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal, seperti status pernikahan dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, atau wilayah tempat tinggal. Uji ini bertujuan untuk



mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut atau apakah perbedaan yang terjadi hanya bersifat kebetulan. Misalnya, dalam studi yang meneliti pengaruh tingkat pendidikan terhadap status pernikahan, dapat membantu menentukan apakah proporsi individu yang menikah, belum menikah, atau bercerai berbeda secara signifikan di setiap jenjang pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dalam penelitian kependudukan dan pernikahan memberikan dasar empiris dalam memahami pola-pola sosial yang muncul di masyarakat.

Hal Logis X2 –Y

Jumlah penduduk dan pernikahan memiliki hubungan yang erat. Pernikahan dapat mempengaruhi tingkat kelahiran, yang pada gilirannya mempengaruhi jumlah penduduk. Semakin tinggi tingkat pernikahan dan kelahiran, semakin besar kemungkinan jumlah penduduk akan meningkat. Selain itu, struktur penduduk juga dapat dipengaruhi oleh pernikahan, termasuk distribusi usia dan jenis kelamin. Dengan demikian, memahami hubungan antara jumlah penduduk dan pernikahan dapat membantu dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan kependudukan.

Definisi X3

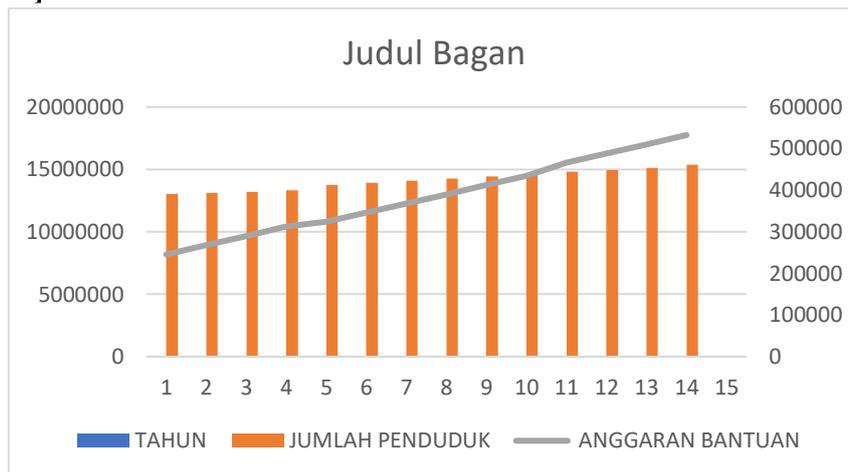
Terakhir selain jumlah penduduk dan pernikahan factor lain yang mempengaruhi jumlah anggaran adalah Jumlah anggaran bantuan dapat bervariasi tergantung pada sumber dan tujuan bantuan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi internasional seperti PBB dapat memiliki anggaran untuk bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan pembangunan. Jumlah anggaran bantuan dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan prioritas, serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian, anggaran bantuan dapat digunakan secara efektif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jumlah anggaran bantuan dapat bervariasi tergantung pada sumber dan tujuan bantuan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi internasional seperti PBB dapat memiliki anggaran untuk bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan pembangunan. Jumlah anggaran bantuan dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan prioritas, serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian, anggaran bantuan dapat digunakan secara efektif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hal Logis [X3-Y]

Menurut ahli demografi dan ekonomi, jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan kebutuhan anggaran bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pernikahan juga dapat mempengaruhi jumlah penduduk melalui kelahiran anak, sehingga mempengaruhi kebutuhan anggaran bantuan. Ahli seperti Amartya Sen menekankan pentingnya anggaran bantuan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian, perencanaan anggaran bantuan yang efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.



Ga Data [X3-Y]



Gambar grafik yang ditampilkan merupakan representasi visual dalam bentuk gabungan antara diagram batang dan grafik garis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah penduduk dan anggaran bantuan selama periode waktu 15 tahun. Pada grafik tersebut, sumbu horizontal atau sumbu X menampilkan data berdasarkan urutan waktu dalam hitungan tahun, yang ditandai dari angka 1 hingga 15. Sumbu vertikal di sisi kiri menampilkan data jumlah penduduk dengan nilai yang sangat besar, kemungkinan besar satuannya adalah jumlah individu atau jiwa, mengingat nilainya mencapai lebih dari 12 juta hingga mendekati 15 juta jiwa. Sementara itu, sumbu vertikal di sebelah kanan tampaknya digunakan untuk menunjukkan besaran anggaran bantuan, yang nilainya berkisar antara 200.000 hingga 600.000, kemungkinan dalam satuan ribuan atau jutaan rupiah, tergantung konteks sebenarnya dari data tersebut. Jumlah penduduk divisualisasikan menggunakan batang vertikal berwarna merah tua, sedangkan anggaran bantuan divisualisasikan menggunakan garis berwarna hijau muda yang menunjukkan tren peningkatan secara linier. Dari grafik tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah penduduk secara bertahap dari tahun ke tahun. Grafik batang merah menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk mengalami kenaikan yang relatif konsisten, meskipun pertumbuhan tersebut tidak terlalu tajam. Di sisi lain, garis hijau yang mewakili anggaran bantuan menunjukkan kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun, dan justru mengalami pertumbuhan yang cenderung lebih teratur dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini dapat diartikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan anggaran—seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga sosial—telah berusaha menyesuaikan besaran bantuan yang dialokasikan berdasarkan peningkatan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahun. Artinya, terdapat korelasi positif antara jumlah penduduk dan jumlah anggaran bantuan, di mana penambahan penduduk mendorong perlunya peningkatan alokasi dana bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga kestabilan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

Gap Riset [X3-Y]

Meskipun data yang disajikan dalam grafik tersebut sangat potensial untuk mendukung analisis kebijakan, masih terdapat beberapa kekurangan dari segi penyajian grafis yang perlu diperbaiki agar lebih komunikatif dan informatif. Pertama, judul grafik masih menggunakan teks default "Chart Title", yang seharusnya diganti dengan judul yang lebih relevan dan deskriptif seperti "Perkembangan Jumlah Penduduk dan Anggaran Bantuan Selama 15 Tahun Terakhir". Judul yang tepat akan membantu pembaca memahami konteks data sejak awal tanpa



harus menebak isi grafik. Kedua, label sumbu, baik pada sumbu X maupun sumbu Y, tidak dijelaskan secara rinci, termasuk satuan ukuran yang digunakan. Misalnya, jika jumlah penduduk ditampilkan dalam satuan jiwa, dan anggaran dalam juta atau miliar rupiah, maka hal ini perlu dijelaskan dengan jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir. Ketiga, meskipun legenda sudah cukup membantu dengan adanya keterangan warna biru (untuk tahun), merah (jumlah penduduk), dan hijau (anggaran bantuan), sebenarnya label "tahun" pada legenda bisa dihilangkan karena informasi tersebut sudah jelas dari sumbu X. Penekanan pada dua variabel utama yaitu jumlah penduduk dan anggaran bantuan akan membuat visualisasi lebih bersih dan fokus.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara anggaran bantuan dan jumlah penduduk, sementara jumlah pernikahan memiliki pengaruh yang fluktuatif terhadap pertumbuhan penduduk. Keduanya terbukti berkontribusi terhadap dinamika kependudukan di Sumatera Utara, meskipun tidak secara linear. Anggaran bantuan yang meningkat cenderung diikuti oleh pertumbuhan penduduk sebagai respons terhadap peningkatan kesejahteraan dan layanan sosial. Di sisi lain, jumlah pernikahan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi seperti kondisi keuangan dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan distribusi kesejahteraan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan keterkaitan antara faktor demografis dan alokasi anggaran secara terpadu dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bongaarts, J. (1982). The fertility-inhibiting effects of the intermediate fertility variables. *Studies in Family Planning*, 13(6-7), 179–189.
- Bongaarts, J. (2007). The causes of stalling fertility transitions. Population Council.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2016). *Statistik Penduduk Sumatera Utara 1987–2016*. Medan: BPS Sumut.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2023). *Statistik Kependudukan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BPS.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: Islamic Foundation Iskandar. (2013). *Pembangunan Ekonomi dan Kependudukan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- McDonald, P. (2000). Gender equity in theories of fertility transition. *Population and Development Review*, 26(3), 427–439.
- Nock, S. L. (1995). A comparison of marriages and cohabiting relationships. *Journal of Family Issues*, 16(1), 53–76.
- Notoadmodjo, S. (2003). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.



Olson, D. H., & DeFrain, J. (2006). *Marriage and the family: Diversity and strengths*. New York: McGraw-Hill.

Santrock, J. W. (2006). *Life-span development* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.

Soekanto, S. (1982). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rajawali Press

Sumut. (2017). *Laporan Pembangunan Ekonomi dan Kependudukan Sumatera Utara*. Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Todaro, M. P. (2003). *Economic development* (8th ed.). Boston: Addison Wesley.

Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Umer, M. (2013). *Ekonomi dan Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.